



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.

Jabatan : Kepala Biro Persidangan II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.

Jabatan : Deputy Bidang Persidangan

selaku Deputy Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA

Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP.196804291997031001

PIHAK PERTAMA

Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERSIDANGAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₁₁)	5,972
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,308
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₂₂₁)	0,106
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₃₂₁)	-
5	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₄₂₁)	-
6	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (K ₂₁₂₁)	0,116
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K ₂₁₂₂)	0,56
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI (K ₂₁₂₅)	0,734

Kegiatan / RO		Anggaran	
A.	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	Rp	471.200.274.000,00
1	001 - Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	Rp	445.184.399.000,00
2	003 - Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD		-
3	001 - RUU Usul DPD RI Tugas Komite I	Rp	11.864.822.000,00
4	011 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite II		-
5	012 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite IV		-
6	015 - Hasil Penyusunan Pandangan /Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite II)	Rp	1.251.237.000,00
7	016 - Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV	Rp	7.773.658.000,00
8	002 - RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Rp	4.853.058.000,00
9	019 - RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II		-
10	020 - RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite IV DPD		-
11	001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara	Rp	273.100.000,00
12	002 - Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara		-
13	021 - RUU APBN Hasil Pertimbangan DPD RI		-
14	023 - RUU Lainnya hasil pertimbangan DPD RI bidang tugas Komite IV		-

B.	Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Rp	30.141.445.000,00
1	001 - Pertimbangan DPD RI atas calon Anggota BPK	Rp	168.350.000,00
2	004 - Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan II	Rp	1.880.000.000,00
3	005 - Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II	Rp	1.098.195.000,00
4	006 - Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV	Rp	1.051.088.000,00
5	009 - Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II		-
6	010 - Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV		-
7	012 - Laporan materi persidangan lingkup Biro Persidangan II		-
8	001 - Rekomendasi Pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK		-
9	004 - Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II)	Rp	12.003.061.000,00
10	005 - Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV	Rp	7.488.343.000,00
11	006 - Hasil pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	Rp	6.452.408.000,00
12	005 - Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II		-
13	001 - Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara		-
14	006 - Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV		-
C.	Pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	Rp	57.486.077,00
15	001 - Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemda	Rp	1.993.392.000,00
16	002 - Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah	Rp	1.823.208.000,00
17	003 - Kebijakan Non RUU/UU Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan	Rp	2.771.800.000,00

18	004 - Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)	Rp	11.000.000.000,00
19	005 - Pelaksanaan Tugas Panmus/Pansus DPD RI	Rp	3.000.000.000,00
20	001 - Sidang Tahunan DPD	Rp	6.756.232.000,00
21	001 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah		-
22	001 - Putusan atas Pelaksanaan Kode Etik dan Tata Beracara		-
23	001 - Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Internal Dewan		-
24	008 - Laporan Pelaksanaan Tugas Panmus/ Pansus DPD RI		-
25	002 - Sidang Paripurna bersama DPD/DPR		-

*Catatan: Target dan anggaran yang masih kosong akan berlaku di tahun 2026

Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP.196804291997031001

PIHAK PERTAMA

Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003